

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KEDIRI**

- 1 INSTANSI : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri
- VISI : Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel
- MISI : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
Pengelolaan Aset yang efisien dan terandalkan
- TUJUAN : Meningkatkan pendapatan daerah utamanya PAD.
Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Meningkatkan Pengelolaan Aset yang terencana dan terukur
- TUGAS : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan
- FUNGSI :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
e. Pemerintahan daerah dibidang keuangan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugasnya

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah	Opini BPK terhadap LKPD	<p>Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.</p> <p>Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat :</p> <p>Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p> <p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.</p> <p>Wajar Dengan Pengecualian (WDP)</p> <p>Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.</p> <p>Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)</p> <p>Tidak memberikan pendapat (TMP) adalah opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.</p> <p>Tidak Wajar</p> <p>Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.</p>	Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri	Seluruh Bidang
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\Sigma \text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Berjalan}}{\Sigma \text{Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Dasar}} \times 100\%$ <p>Formula indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ini adalah jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun dasar.</p> <p>Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah serta sebagai wujud semangat desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Semakin tinggi Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun dasar, menunjukkan bahwa kondisi keuangan suatu daerah semakin mandiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD • Neraca • LRA 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Aset, Bidang Pendataan - Bidang Pembukuan - Bidang Pengendalian Operasioanal